

### **BAB III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

##### **1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;**

Program Prioritas yang dibiayai oleh APBD Provinsi Jambi adalah 4 (empat) Program Utama dan 1 (satu) Program Pendukung sebagai berikut :

##### **Program Utama :**

- (1). Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- (2). Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- (3). Program Penanganan Kerawanan Pangan
- (4). Program Pengawasan Keamanan Pangan

##### **Program Pendukung :**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi bertujuan untuk memenuhi pelayanan administrasi kantor.

Dalam melaksanakan Program-program tersebut diatas terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- (1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (3). Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- (4). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- (5). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (6). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- (7). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- (8). Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.
- (9). Penyediaan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- (10). Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.
- (11). Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (12). Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.
- (13). Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi.
- (14). Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi.
- (15). Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

**Sasaran dari 4 (empat) Program Utama:**

Sasaran yang hendak dicapai dalam Pemantapan Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan yang meliputi :

- (1). Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
- (2). Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan 1% per tahun.
- (3). Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/kap/hari dan Protein sebesar 63 gr/kap/hari.
- (4). Stabilitasnya Harga Pangan Pokok dan Strategis di tingkat Produsen dan Konsumen.
- (5). Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk mengantisipasi Kerawanan Pangan.
- (6). Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

## Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 2. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan	%	7,5	12,14	61,78	Rendah
		% Daerah Rentan Rawan Pangan	%	7,5	4,90	153,06	Sangat Baik
		Desa Mandiri Pangan	Desa	31	31	100,00	Sangat Baik
2	Penguatan Cadangan Pangan	% Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	19,61	70,07	357,32	Sangat Baik
3	Meningkatkan Akses terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 2,8 %	357,14	Sangat Baik
		Stabilitas Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 12,6 %	238,10	Sangat Baik
4	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal	Skor PPH Ketersediaan	Skor	87,5	86,20	98,51	Sangat Baik
		Ketersediaan Energi	Kkal/kap/hr	3.010	2.819	93,65	Sangat Baik
		Ketersediaan Protein	Gr/kap/hr	81,5	70,25	86,20	Tinggi
5	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi	Skor	92,5	93,4	100,97	Sangat Baik
		Konsumsi Beras	Kg/kap/thn	88,2	88,1	100,11	Sangat Baik
		Konsumsi Energi	Kkal/kap/hr	2.090,3	2.070	99,03	Sangat Baik
		Konsumsi Protein	Gr/kap/hr	61	60,7	99,51	Sangat Baik
6	Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan	% peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan di Prov. Jambi	%	69,21	88,24	127,50	Sangat Baik

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi memiliki 6 (enam) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis. Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Tahun 2022 telah terealisasi secara keseluruhan memenuhi target yang ditetapkan dengan persentase 91 - 100 % kriteria sangat baik, bahkan ada yang melebihi target (tercapai  $\geq 100\%$ ). Artinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi hingga akhir Tahun 2022 telah mampu melaksanakan Program kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026.

### **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Pada Tahun Anggaran 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi rata-rata mencapai kinerja sebesar 100 %. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

#### **Sasaran 1.**

Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan dengan indikator kinerjanya yakni :

1. Persentase Penduduk Berisiko Rentan Rawan Pangan.
2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan.
3. Desa Mandiri Pangan.

Sasaran ini dicapai melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, yang operasionalnya didukung oleh Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Kewenangan Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.
  - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur.

- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan yang operasionalnya didukung oleh
- Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan didukung Sub Kegiatanya yaitu Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan Sub Kegiatanya yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan	7,5 %	12,14 %	61,78
		% Daerah Rentan Rawan Pangan	7,5 %	4,90 %	153,06
		Desa Mandiri Pangan	31 Desa	31 Desa	100,00

Dari tabel 1 diatas terlihat bahwa sasaran 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan indikator-indikatornya sebagian besar telah mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaiannya sangat baik, namun masih ada 1 indikator yang masih rendah yakni persentase penduduk beresiko rawan pangan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Capaian Kinerja 2021-2022**

No	Indikator	Capaian 2021		Capaian 2022		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1.	% Penduduk Berisiko Rawan Pangan	9,0 %	9,0 %	7,5 %	12,14 %	61,78
2.	% Daerah Rentan Rawan Pangan	9,0 %	9,0 %	7,5 %	4,90 %	153,06
3.	Desa Mandiri Pangan	22 Desa	22 Desa	31 Desa	31 Desa	100,00

**IK : % Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan.**

Didalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ditargetkan Penurunan Penduduk Rawan Pangan setiap tahun sebesar 1%, dan target Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan hingga akhir Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan bahwa diharapkan Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi menjadi 7,5%.

Untuk mengukur persentase penurunan penduduk berisiko rawan pangan tersebut memerlukan data yang lengkap dan perlu kajian khusus, dan dikarenakan keterbatasan baik dana maupun data yang tersedia, maka data yang kami tampilkan merupakan hasil kajian dari Badan Pangan Nasional RI dan merupakan angka Tahun 2022.

Salah satu indikator bahwa suatu wilayah dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik adalah diukur dengan melihat seberapa banyak jumlah penduduk yang rawan pangan atau yang tahan pangan.

Kerawanan Pangan dapat diartikan apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup, dan apabila konsumsi makanannya berada dibawah kalori minimum yang dibutuhkan.

Kondisi kerawanan pangan yang akut akan menyebabkan kelaparan: yaitu kondisi dimana individu tidak mampu memenuhi 70% kebutuhan pangan dan gizinya berturut-turut selama dua bulan, dan diikuti dengan penurunan berat badan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, diperoleh gambaran bahwa Jumlah Penduduk Berisiko Rawan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebesar 12,14% dari target 7,5 %. Artinya untuk indikator Penurunan Penduduk Berisiko Rawan Pangan selama Tahun 2022 tidak terjadi penurunan melainkan sebaliknya terjadi kenaikan persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan sebesar 4,64% dari yang ditargetkan. Terjadinya kenaikan penduduk berisiko rawan pangan sebesar 4,64% diduga karena adanya kasus Covid-19 yang cukup berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat di Provinsi Jambi.

#### **IK : % Daerah Rentan Rawan Pangan.**

Untuk indikator penurunan persentase (%) Daerah Rentan Rawan Pangan, berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022, diperoleh gambaran bahwa jumlah daerah rentan rawan pangan (Kecamatan Rentan Pangan : Prioritas 1-3) terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang masuk kedalam kategori prioritas 1-3 (rawan pangan) atau sebesar 4,90% dari sebanyak 143 kecamatan di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan secara daerah / kecamatan telah terjadi penurunan jumlah daerah/kecamatan yang rentan rawan pangan dibanding tahun sebelumnya.

Bila kita melihat pada target penurunan persentase (%) daerah rentan rawan pangan tahun 2022, terlihat bahwa dari yang ditargetkan sebesar 7,5% diperoleh hasil bahwa daerah berisiko rawan pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 4,90%. Ini menunjukkan bahwa selama tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil menurunkan % daerah berisiko rawan pangan sebesar 2,6% dari yang ditargetkan. Sedangkan capaian Kinerja yang diperoleh adalah sebesar 153,1%. Ini menunjukkan capaian kinerja dengan nilai Sangat Baik (diatas 100%).

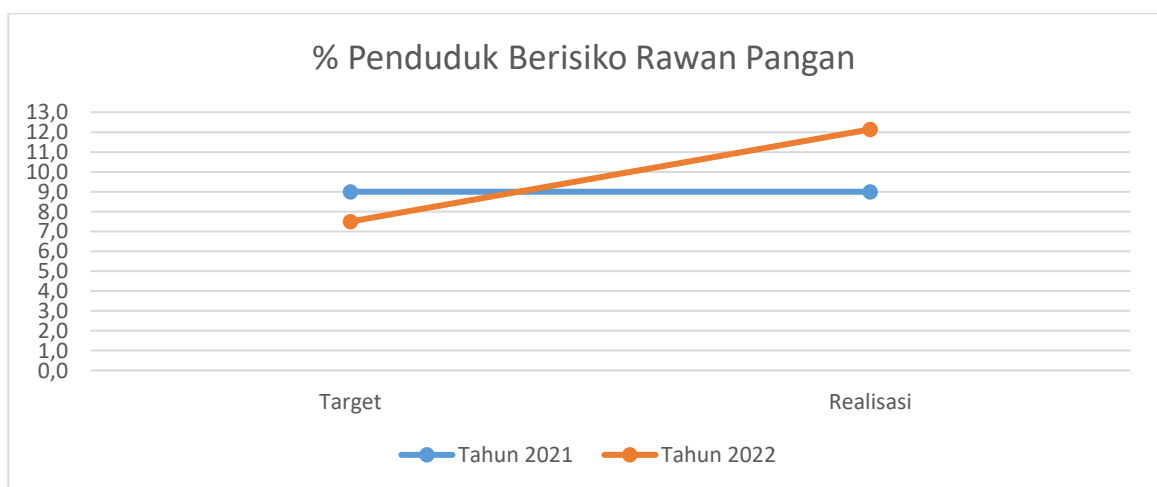
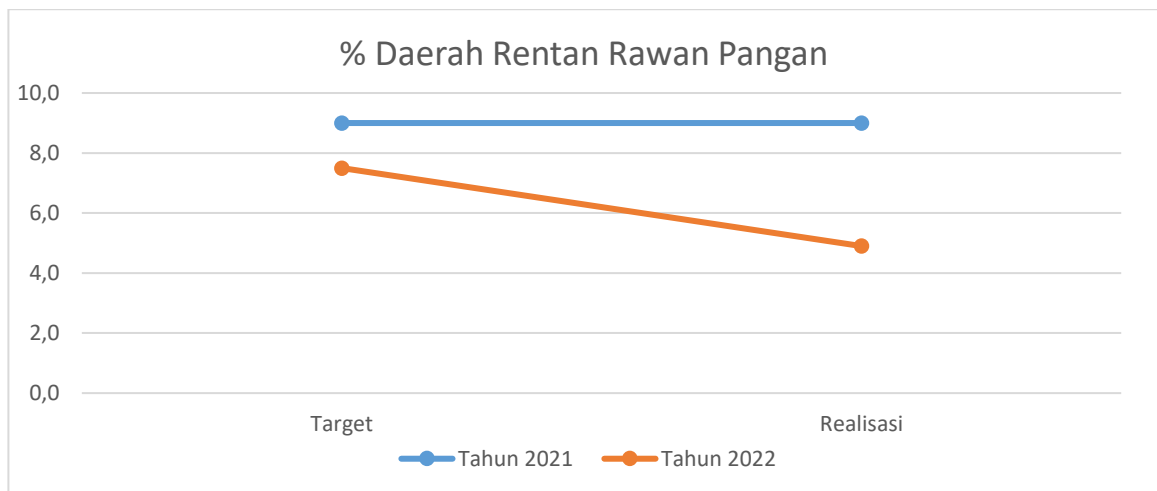


## IK : Desa Mandiri Pangan.

Untuk mencegah atau menurunkan kerawanan pangan ini maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah berupaya untuk melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penyediaan Protein Hewani dan Kegiatan Pemberian Bantuan terhadap daerah-daerah yang mengalami bencana alam berupa bantuan bahan pangan pokok yang diambilkan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik Capaian Kinerja Pertahun berdasarkan Indikator dari Sasaran 1.**





## Sasaran 2.

Penguatan Cadangan Pangan Pangan, yaitu Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk Mengantisipasi Kerawanan Pangan dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Sasaran ini dicapai melalui Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Penguatan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	19,61	70,07	357,32

Dari tabel diatas bahwa sasaran kinerja dalam Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk mengantisipasi Kerawanan Pangan dengan indikator-indikatornya mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaiannya yang sangat baik untuk semua indikatornya.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. Capaian Kinerja 2021-2022**

No	Indikator	Capaian 2021		Capaian 2022		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	19,61	37,13	19,61	70,07	357,32

#### **IK : Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub Nomor 12 Tahun 2013.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah dilaksanakan dari Tahun 2013 hingga Tahun 2022. Untuk total pengadaan beras selama tahun 2013 – 2022 adalah sebanyak 346.182 kg dan telah dikeluarkan / disalurkan sebanyak 120.839 kg untuk membantu masyarakat yang terkena bencana atau mengalami kerawanan pangan. Adapun rincian Kondisi Cadangan Pangan Pokok Daerah (CPPD) dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

LAPORAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP) PROVINSI JAMBI TAHUN 2022								
(Per Desember 2022)								
No.	Tahun	Stock Awal (Kg)	Pengadaan (Kg)	Total Penyaluran (Kg)	Sisa (Kg)	Jumlah CBP Ideal Tahun 2022 (Kg)	Persentase Ketersediaan CBP (%)	Keterangan
1	2013	0	70.000	0	70.000	321.592	70,07	Jumlah cadangan beras pemerintah Provinsi Jambi ideal adalah : 321.592 Kg. (Tabel Hasil Perhitungan CBP Tahun 2022)
2	2014	70.000	20.000	3.449	86.551			
3	2015	86.551	0	9.348,50	77.202,50			
4	2016	77.203	0	22.837,50	54.365			
5	2017	54.365	7.000	6.102	55.263			Stok CBP yang ada per 22 Nov. Tahun 2022 : 225.343 Kg.  Persentase Cad. Pangan Provinsi Jambi = 225.343/321.592*100 = 70,07%
6	2018	55.263	12.000	5.400	61.863			
7	2019	61.863	3.805	24.396	41.272			
8	2020	41.272	948	0	42.220			
9	2021	42.220	103.500	37.560	108.160			
10	2021	108.160	9.285	-	117.445			
11	2022	117.445	4.423	11.746	110.122			
12	2022	110.122	115.221	-	225.343			
Jumlah			346.182	120.839	225.343			

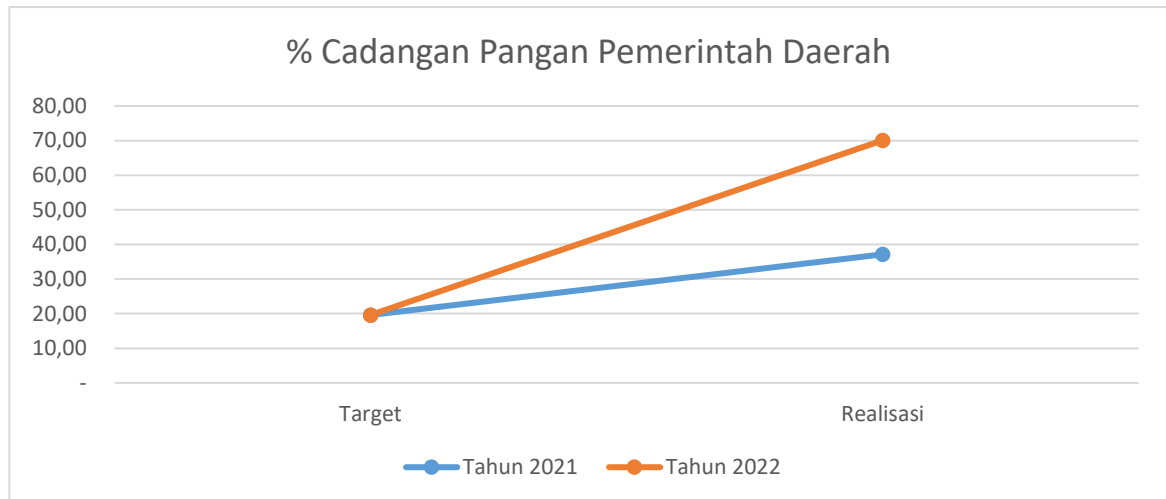
Sedangkan total penyaluran cadangan beras pemerintah Provinsi Jambi selama Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022.

No	Kabupaten/ Kota	Lokasi	Waktu	Jumlah (Kg)
1	Sarolangun	Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun.	Januari 2022	1.260
2	Bungo	Kecamatan Rantau Pandan, Bungo Dani, Bathin II Babeko, Pelepat, Pelepat Ilir, Muko-muko Bathin VII, Tanah Tumbuh, Jujuhan, Jujuhan Ilir.	Januari 2022	10.486
TOTAL PENYALURAN				<b>11.746</b>

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

## Grafik Capaian Kinerja Pertahun berdasarkan Indikator dari Sasaran 2.



### Sasaran 3.

Meningkatkan Akses Terhadap Bahan Pangan dengan indikator kerjanya yakni :

1. Stabilitas Harga Pangan Pokok  $CV < 10\%$ .
2. Stabilitas Harga Pangan Strategis  $CV < 30\%$ .

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan-kegiatan:

- Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan Sub Keegiatannya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagaimana tabel 5 berikut :

**Tabel 5. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Meningkatkan Akses Terhadap Bahan Pangan	Stabilitas Harga Pangan Pokok	$CV < 10 \%$	$CV < 2,8 \%$	357,14
		Stabilitas Harga Pangan Strategis	$CV < 30 \%$	$CV < 12,6\%$	238,10

Dari tabel diatas bahwa sasaran kinerja dalam Stabilitasnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen dengan indikator-indikatornya mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaiannya yang sangat baik, hanya saja harga komoditi cabe merah yang masih terjadi lonjakan harga pada saat hari-hari besar keagamaan sehingga mempengaruhi fluktuasi harga komoditas strategis hortikultura.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

**Tabel 7. Capaian Kinerja 2021-2022**

No	Indikator	Capaian 2021		Capaian 2022		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Stabilitas Harga Pangan Pokok	CV < 10 %	CV < 2,5%	CV < 10 %	CV < 2,8%	400,00
2.	Stabilitas Harga Pangan Strategis	CV < 30 %	CV < 10,09%	CV < 30 %	CV < 12,6%	297,32

#### **IK : Stabilitas Harga Pangan Pokok.**

Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terkait stabilitas harga pangan pokok adalah CV < 10%. Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan diperoleh gambaran bahwa Harga Pangan Pokok dalam hal ini beras selama tahun 2022 dapat dikatakan Stabil dengan CV < 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa untuk harga pangan pokok (beras) selama tahun 2022 di Provinsi Jambi cukup baik, tidak berfluktuasi terlalu tinggi.

## **IK : Stabilitas Harga Pangan Strategis**

Target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi terkait Stabilitas Harga Pangan Strategis adalah  $CV < 30\%$ .

Berdasarkan hasil pemantauan harga yang dilakukan oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan diperoleh gambaran bahwa Perkembangan Harga Pangan Strategis (Hortikultura) periode Januari sampai dengan Desember 2022 rata-rata untuk Komoditi Hortikultura Cenderung stabil dengan  $CV < 12,6\%$ , kecuali untuk komoditi cabe merah keriting  $CV > 30\%$  ( $CV = 44,6\%$ ) dengan harganya mencapai Rp. 87.643.-/kg, hal ini disebabkan adanya kelangkaan produksi cabe merah keriting di beberapa wilayah, sehingga harga melonjak cukup tinggi, dan juga adanya kegagalan panen di beberapa tempat, disamping itu secara umum dikarenakan kita masih menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) yang berdampak pada perekonomian masyarakat dan mempengaruhi kondisi harga pangan pokok/strategis di daerah termasuk Provinsi Jambi.

Untuk selengkapnya Perkembangan Harga Pangan Pokok (Beras) dan Pangan Strategis (Hortikultura) sebagai mana table 8 berikut :

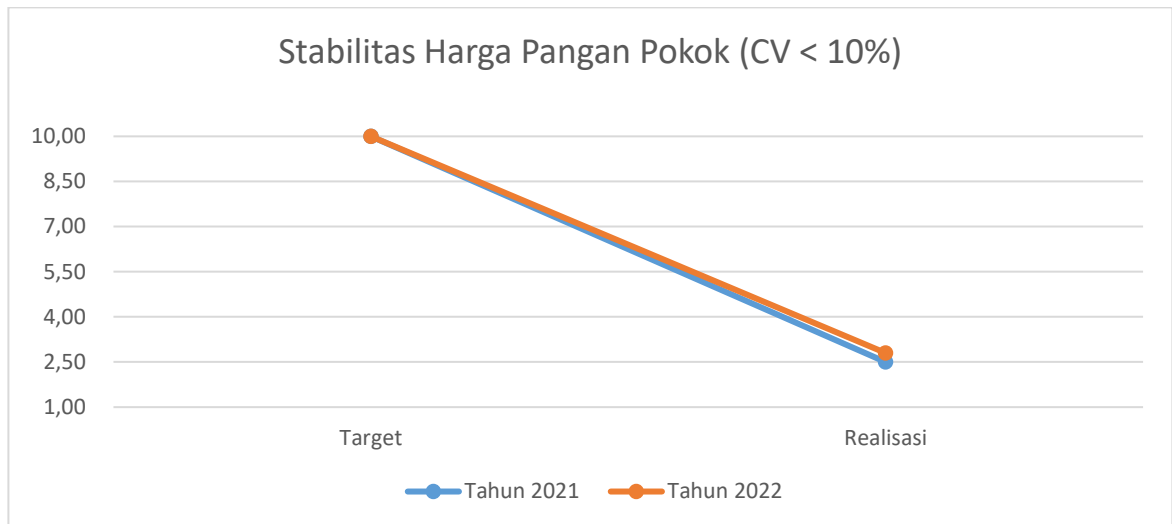
Tabel 8 . LAPORAN PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA PANGAN POKOK/STRATEGIS TINGKAT PEDAGANG ECERAN/KONSUMEN DI 11 KAB/KOTA  
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

NO	Komoditas	Satuan Harga	HPP/ HAP	BULAN												Harga Rata - Rata	Min	Max	Stdev	CV
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember					
1	Beras Premium	Rp/Kg	13.300	12.180	12.145	12.132	12.119	11.961	11.911	11.899	11.937	12.337	12.749	12.976	13.203	12.296	11.899	13.203	440	3,6
2	Beras Medium	Rp/Kg	9.950	10.193	10.144	10.247	10.266	10.225	10.146	10.191	10.249	10.593	10.929	10.937	10.948	10.422	10.144	10.948	332	3,2
3	Kedelai Biji Kering Import	Rp/Kg	12.000	11.556	11.817	12.370	13.044	13.093	13.538	13.737	13.753	13.870	14.248	14.523	14.762	13.359	11.556	14.762	1.022	7,6
4	Bawang Merah	Rp/Kg	36.500-41.500	23.905	29.001	30.658	29.493	37.682	46.258	47.370	30.792	27.689	28.647	28.304	26.631	32.202	23.905	47.370	7.554	23,5
5	Bawang Putih Bonggol	Rp/Kg		25.553	26.061	26.760	28.069	26.957	23.082	22.654	23.297	22.324	22.504	21.809	22.700	24.314	21.809	28.069	2.196	9,0
6	Cabai Merah Keriting	Rp/Kg	37.000-55.000	25.442	32.583	42.955	30.568	34.977	72.142	87.643	67.709	63.238	36.340	28.949	33.620	46.347	25.442	87.643	20.656	44,6
7	Cabai Rawit Merah	Rp/Kg	40.000-57.000	51.935	44.251	53.532	42.237	50.777	87.296	93.088	64.853	62.857	53.827	45.140	50.083	58.323	42.237	93.088	16.378	28,1
8	Daging Sapi Murni (Segar)	Rp/Kg	140.000	126.351	128.608	131.325	138.082	141.259	138.755	140.903	137.636	138.545	138.636	139.152	139.123	136.531	126.351	141.259	4.914	3,6
9	Daging Ayam Ras	Rp/Kg	36.750	41.338	33.138	35.604	36.605	38.167	33.179	33.581	30.845	30.629	29.266	29.644	33.783	33.815	29.266	41.338	3.624	10,7
10	Telur Ayam Ras	Rp/Kg	27.000	26.451	23.768	23.515	23.965	25.106	26.647	27.400	27.061	28.452	26.945	26.703	28.121	26.178	23.515	28.452	1.688	6,4
11	Gula Pasir Konsumsi	Rp/Kg	13.500-14.500	13.196	13.625	13.813	14.179	14.311	14.261	14.215	14.166	14.127	14.091	14.100	14.030	14.009	13.196	14.311	320	2,3
12	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Rp/Ltr		18.276	16.971	18.824	21.730	22.515	21.740	20.639	16.830	16.181	15.739	15.314	15.426	18.349	15.314	22.515	2.684	14,6
13	Tepung Terigu (Curah)	Rp/Kg		8.122	8.552	8.724	9.403	9.152	9.276	9.532	9.847	10.081	10.469	10.596	10.765	9.543	8.122	10.765	840	8,8
14	Minyak Goreng Curah	Rp/Ltr	14000				17.622	17.263	16.518	14.779	13.302	13.211	12.992	13.317	13.451	14.717	12.992	17.622	1.903	12,9
15	Jagung Tk Peternak	Rp/Kg	5.000					5.400	5.410	5.485	5.476	5.486	5.500	5.526	5.795	5.510	5.400	5.795	123	2,2
Strategis				33.830	33.489	36.189	33.750	35.938	41.891	43.795	37.508	36.767	33.642	32.296	33.541	51.409	45.344	64.663	6.478	12,6
Pokok				11.186	11.144	11.190	11.193	11.093	11.028	11.045	11.093	11.465	11.839	11.956	12.075	11.294	11.028	11.956	321	2,8



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik Capaian Kinerja Pertahun berdasarkan Indikator dari Sasaran 3.**



**Sasaran 4.**

Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal, dengan indikator kinerjanya yakni :

1. Skor PPH Ketersediaan.
2. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr).
3. Ketersediaan Protein (gr/kap/hr).

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan-kegiatan:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga.
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.
3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel 9 berikut :

**Tabel 9. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Memantapkan Ketersediaan Pangan Berbasis Kemandirian Lokal.	Skor PPH Ketersediaan	87,5	84,05	96,06
		Ketersediaan Energi	3.010 kkal/kap/hr	2.819 kkal/kap/hr	93,65
		Ketersediaan Protein	81,5 gr/kap/hr	70,25 gr/kap/hr	86,20

Dari tabel diatas bahwa pada sasaran kinerja Memantapkan ketersediaan pangan berbasis kemandirian pangan, dengan target skor PPH ketersediaan sebesar 87,5, Ketersediaan Energi yakni sebesar 3.010 kkal/kap/hr dan Ketersediaan Protein sebesar 81,5 gr/kap/hr, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk ketiga indikator tersebut dengan kriteria persentase capaiannya yang sangat baik di 2 (dua) indikator dan Tinggi 1 (satu) indikator.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

**Tabel 10. Capaian Kinerja 2021-2022**

No	Indikator	Capaian 2021		Capaian 2022		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Skor PPH Ketersediaan	86,5	84,81	87,5	86,20	98,51
2.	Ketersediaan Energi	3.009 kkal/kap/hr	3.008 kkal/kap/hr	3.010 kkal/kap/hr	2.819 kkal/kap/hr	93,65
3.	Ketersediaan Protein	81 gr/kap/hr	80,06 gr/kap/hr	81,5 gr/kap/hr	70,25 gr/kap/hr	86,20

#### **IK : Skor PPH Ketersediaan.**

Skor PPH Ketersediaan ideal tentunya adalah sebesar 100, namun untuk Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menargetkan skor PPH Ketersediaan sebesar **87,5**. Sedangkan realisasi Skor PPH Ketersediaan pada Tahun 2022 adalah sebesar **86,20**. Jika dibandingkan antara target dan realisasi, capaian kinerja untuk pencapaian Skor PPH Ketersediaan telah terpenuhi sebesar **98,51%**, Angka capaian ini telah mendekati apa yang ditargetkan, dengan nilai capaian indikator kriteria **Sangat Baik**.

#### **IK : Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari)**

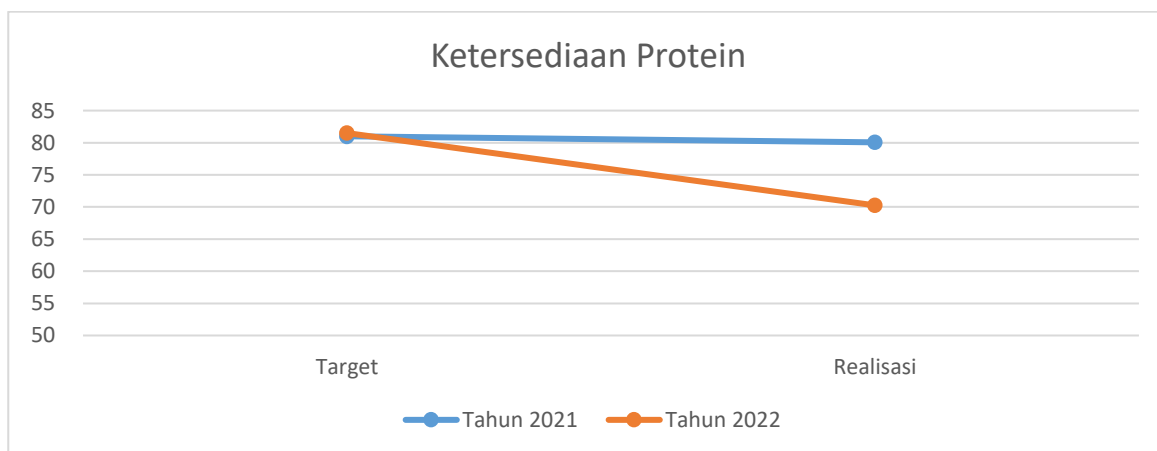
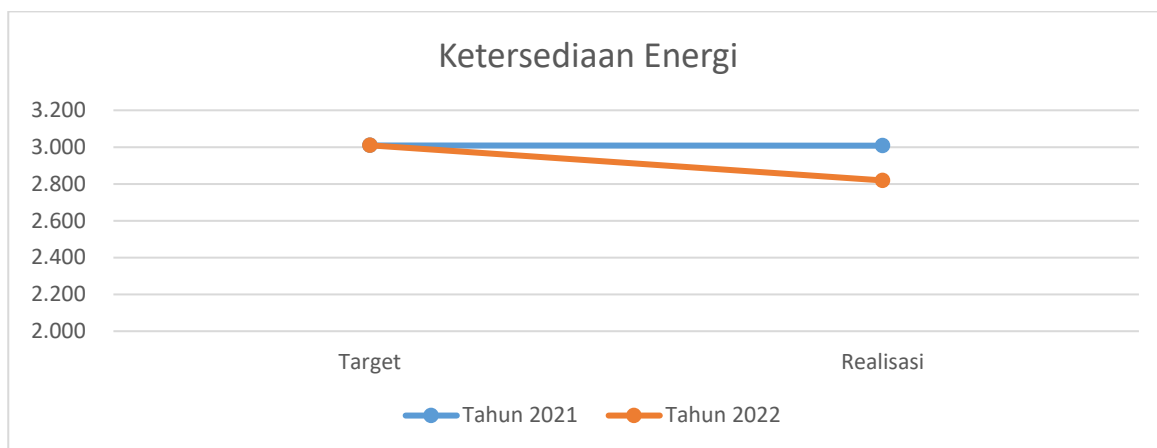
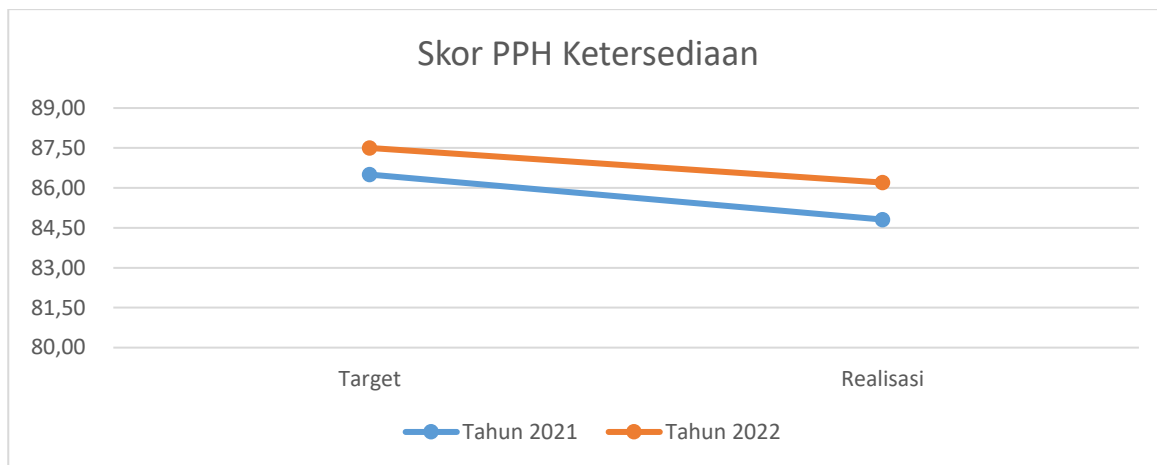
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi Tahun 2022 (Angka Tetap 2021), ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 2.819 kkal/kap/hari, hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar minimal 2.400 kkal/kap/hari, namun jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra sebesar 3.010 kkal/kap/hari, hasil ini masih belum tercapai, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 93,65% dengan kriteria Sangat Baik. Tidak tercapainya ketersediaan energi sebagaimana yang telah ditargetkan, dikarenakan terjadinya penurunan produksi gabah/beras, dari produksi lokal.

#### **IK : Ketersediaan Protein (gram/kap/hari).**

Berdasarkan Pola Pangan Harapan Ketersediaan Protein ideal yakni sebesar 63 gram/kap/hari. Terkait hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja telah menetapkan target Ketersediaan Protein sebesar 81,5 gram/kap/hari, sedangkan realisasi angka Ketersediaan Protein Tahun 2022 sebesar 70,25 gram/kap/hari. Capaian ini telah melebihi dari pola pangan harapan ketersediaan protein yang ideal, namun masih jauh dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan persentase realisasi kinerja nya sebesar 86,20% dengan kriteria **tinggi**.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik Capaian Kinerja Pertahun berdasarkan Indikator dari Sasaran 4.**



### Sasaran 5.

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal dengan indikator kinerjanya yakni :

1. Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Konsumsi.
2. Konsumsi Beras (kg/kap/thn).
3. Konsumsi Energi (kkal/kap/hr).
4. Konsumsi Protein (gr/kap/hr).

Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan-kegiatan:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.
3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel 11 berikut :

**Tabel 11. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal	Skor PPH Konsumsi	92,5	93,4	100,97
		Konsumsi Beras	88,2 kg/kap/thn	88,1 kg/kap/thn	100,11
		Konsumsi Energi	2.090,3 kkal/kap/hr	2.070 kkal/kap/hr	99,03
		Konsumsi Protein	61 gr/kap/hr	60,7 gr/kap/hr	99,51

Dari tabel diatas terlihat bahwa Capaian kinerja sasaran 5, Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal dengan indikator-indikatornya telah mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaian yang sangat baik disemua indikatornya.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

**Tabel 12. Capaian Kinerja 2021-2022**

No	Indikator	Capaian 2021		Capaian 2022		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Skor PPH Konsumsi	90,6	87,3	92,5	93,4	100,97
2.	Konsumsi Beras	89,1 kg/kap/thn	90,0 kg/kap/thn	88,2 kg/kap/thn	88,1 kg/kap/thn	100,11
3.	Konsumsi Energi	2.083 kkal/kap/hr	2.081 kkal/kap/hr	2.090,3 kkal/kap/hr	2.070 kkal/kap/hr	99,03
4.	Konsumsi Protein	60,5 gr/kap/hr	58,0 gr/kap/hr	61 gr/kap/hr	60,7 gr/kap/hr	99,51

#### **IK : Skor PPH Konsumsi**

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter.

Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah **Pola Pangan Harapan** atau disingkat dengan **PPH**. Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional ( SUSENAS ).

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, target Skor PPH Konsumsi Tahun 2022 yakni sebesar **92,5**. Realisasi pada Tahun 2022 yakni sebesar **93,4** dengan capaian kinerja sebesar **100,97 % masih tergolong dalam kriteria Sangat Baik.**

#### **IK : Konsumsi Beras (kg/kap/tahun ).**

Target penurunan tingkat konsumsi beras (1 kg/kap/tahun) Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 yakni **88,2 kg/kap/thn**, sedangkan realisasi sebesar **88,1 kg/kap/thn**, dengan capaian kinerja baik sebesar **100,11 %**. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami tentang perlunya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), ini terbukti penurunan konsumsi beras pada tahun 2022 sebesar 0,1 kg/kap/tahun dan untuk kecukupan konsumsi energi diganti dengan konsumsi pangan lokal non beras.

#### **IK : Konsumsi Energi (kkal/kap/hari).**

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk Tahun 2022 yakni sebesar **2.090,3 kkal/kap/hari**.

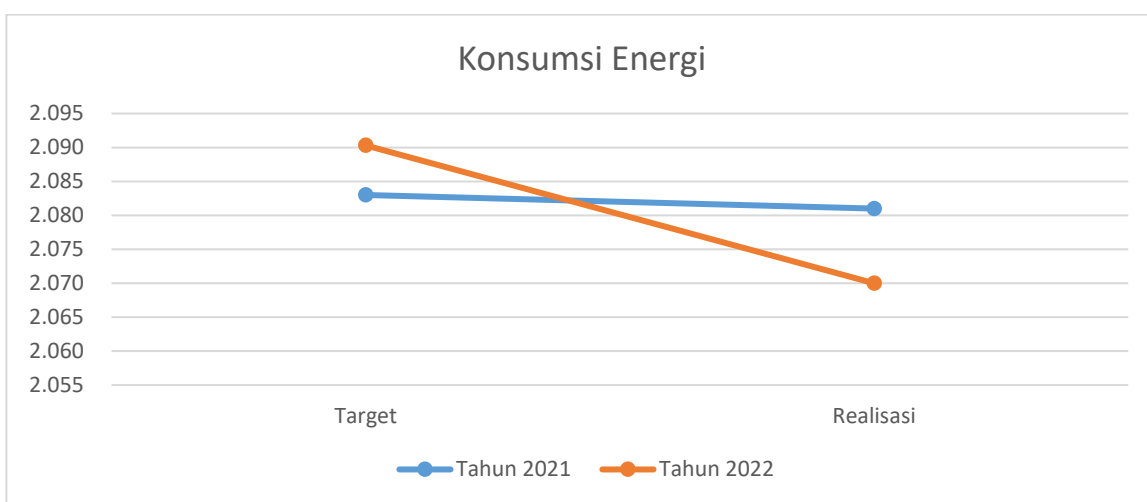
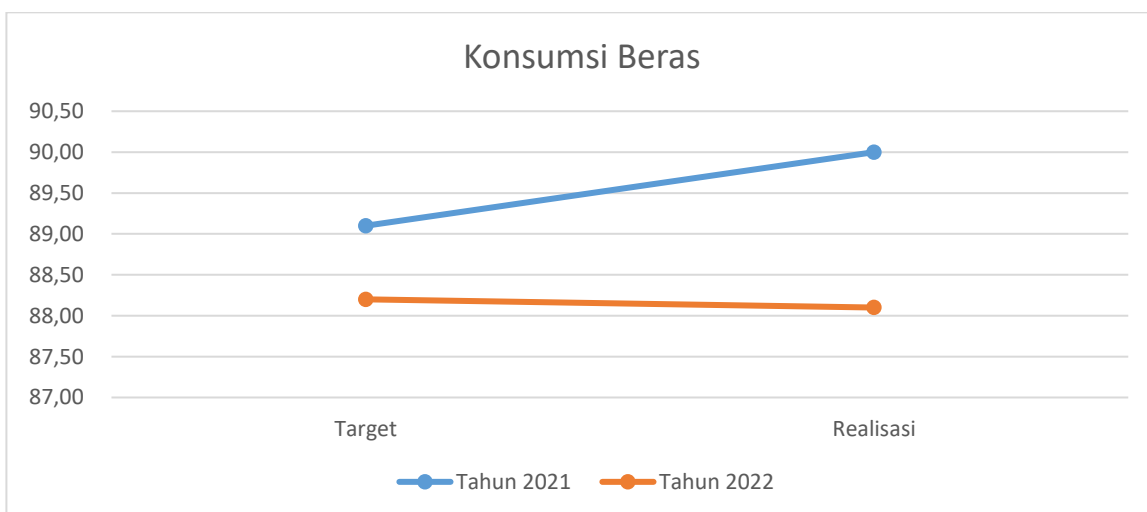
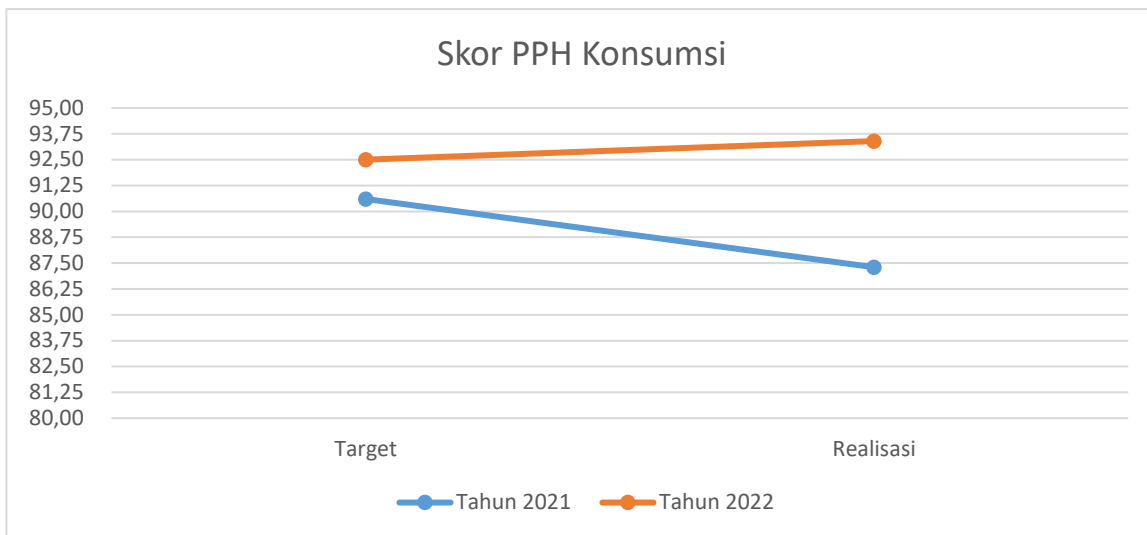
Berdasarkan data hasil kajian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan menggunakan data SUSENAS dari BPS diketahui bahwa realisasi konsumsi energi Tahun 2022 yakni sebesar **2.070 kkal/kap/hari**, dengan capaian kinerja sebesar **99,03%** dengan kriteria penilaian **sangat baik**, hal ini memenuhi target capaian yang diinginkan.

#### **IK : Konsumsi Protein (gram/kap/hari).**

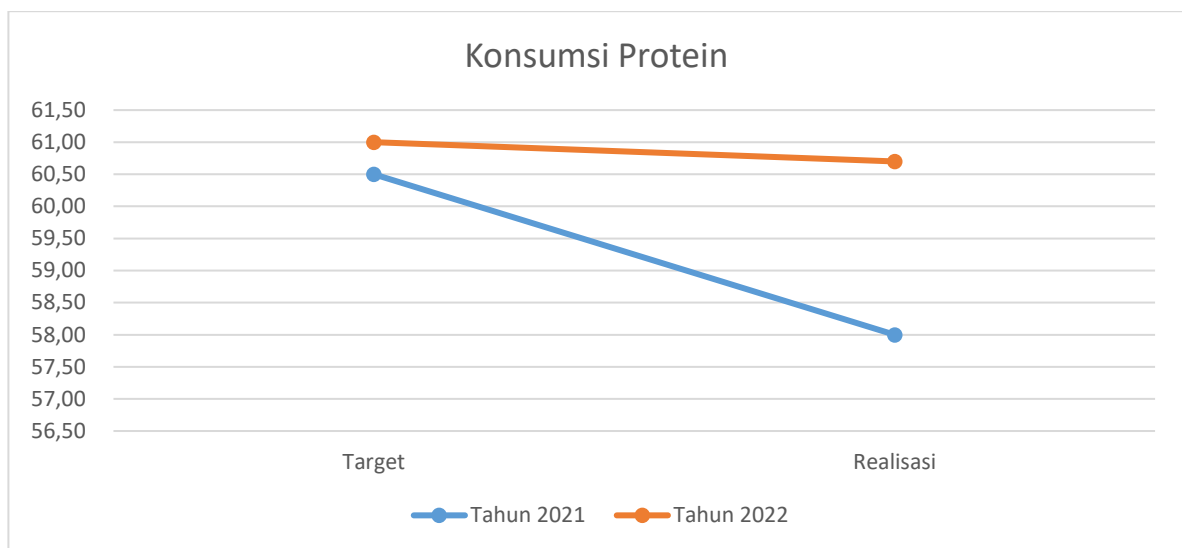
Target terpenuhinya konsumsi protein Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 yakni **61 gram/kap/hari** dan telah terealisasi sebesar **60,7 gram/kap/hari**, dengan capaian kinerja sebesar **99,51%** dan kriteria penilaian **sangat baik** hal ini sudah melebihi target capaian yang diinginkan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik Capaian Kinerja Pertahun berdasarkan Indikator dari Sasaran 5.**







#### **Sasaran 6. :**

Meningkatnya Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan indikator kinerjanya yakni :

- Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengawasan Keamanan Pangan yang operasionalnya didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab/Kota, dengan Sub Kegiatan antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi.
2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota.
3. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota.
4. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kab/Kota.
5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel 13 berikut :

**Tabel 13. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	% Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi	69,21 %	88,24 %	127,50

Dari tabel diatas bahwa sasaran kinerja dalam Meningkatkan Mutu dan Keamanan Pangan Tumbuhan dengan indikator-indikatornya mencapai realisasi kinerja dengan kriteria persentase capaianya yang sangat baik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

**Tabel 14. Capaian Kinerja 2021-2022**

No	Indikator	Capaian 2021		Capaian 2022		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1.	% Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi	66,71 %	90,91 %	69,21 %	88,24 %	127,50

**IK : Persentase Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi.**

Indikator Kinerja Persentase Pengawasan Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan di Provinsi Jambi, sebagaimana Peraturan Gubernur Jambi nomor 5 Tahun 2013 tentang SPM Bidang Ketahanan Pangan, ditargetkan setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 2,5% sehingga target kinerjanya pada Tahun 2022 sebesar 69,21% untuk persentase peningkatan pengawasan dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, dengan realisasi sebesar 88,24%, sebagaimana terlihat pada tabel 14 diatas.

Untuk menghitung Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan dapat diperoleh dari 2 (dua) sumber data / kegiatan yaitu :

- a. Pengawasan di peredaran 60%
- b. Registrasi dan Sertifikasi 40%

Adapun perhitungan dari 2 (dua) sumber data tersebut sebagai berikut :

**a. Pengawasan di Peredaran**

Data yang dibutuhkan:

1. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T).
2. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N).
3. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P).

CAPAIAN PENGAWASAN DI PEREDARAN:

Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran  $(Y) = P/N \times 100\%$

Capaian  $(K) = Y/T \times 100\%$

Capaian Tertimbang  $(K1) = K \times 60\%$

**b. Registrasi dan Sertifikasi**

Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT; untuk kabupaten/Kota hanya no izin edar).

A. Capaian Provinsi

Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/ tahun	Capaian (X)
>1000	100%
500 - ≤ 1000	90%
250 - ≤ 500	70%
100 - ≤ 250	60%
50 - ≤ 100	50%
20 - ≤ 50	40%
< 20	20%

B. Capaian Kab/Kota

Jumlah Registrasi/ tahun	Capaian (X)
>200	100%
150 - ≤ 200	90%
100 - ≤ 150	80%
70 - ≤ 100	60%
40 - ≤ 70	50%
10 - ≤ 40	40%
< 10	20%

c. **Capaian Total**

$$\text{Capaian Total} = K1 + K2$$

Berdasarkan rumus perhitungan diatas maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan telah melaksanakan pengawasan pangan di peredaran, registrasi dan sertifikasi, sebagai mana uraian berikut :

a. Pengawasan di Peredaran :

Target RPJM	: 69,21% (T)
Sampel pengawasan	: 12 (N)
Sampel yang memenuhi syarat	: 10 (P)
Realisasi Y (P/N*100)	: 83,33%
Capaian K (Y/T*100)	: 120,41
K Tertimbang (K1) (K*60%)	: 72,24%

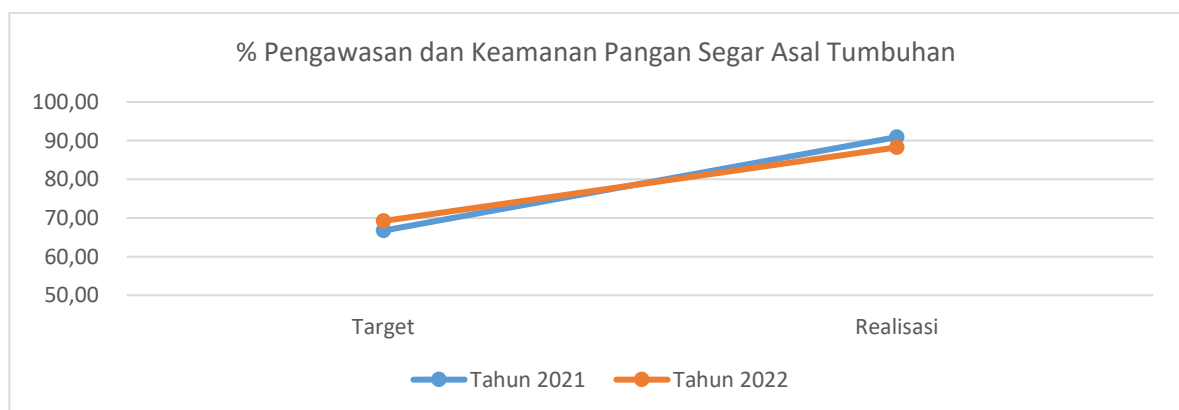
- b. Registrasi dan Sertifikasi :
- |                                                        |        |                   |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Sertifikat (realisasi)                                 | : 34   |                   |
| Izin edar                                              | : 0    |                   |
| SPPB PSAT (Sertifikat Penanganan-<br>Pangan yang Baik) | : 0    |                   |
| HC (Health Certificate)                                | : 6    |                   |
| Jumlah                                                 | : 40   | (Masuk range 40%) |
| Capaian Tetimbang (K2)                                 | : 16%. |                   |
- c. Capaian Total Daerah : 72,24% + 16%  
: 88,24%

Hasil tersebut memang telah melampaui target yang ditetapkan. Namun bila melihat pada total sample yang diuji, hasil tersebut belum mewakili (tidak representatif) sample aman pestisida untuk dikonsumsi Provinsi Jambi.

Untuk itu kedepan diharapkan jumlah sampel komoditi pangan yang diuji dapat lebih ditingkatkan dan demikian pula dengan pembinaan terhadap kelompok tani (pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan) lebih ditingkatkan, sehingga sampel yang diambil dari kelompok tani (pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan) dapat lebih banyak dan hasilnya lebih baik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik Capaian Kinerja Pertahun berdasarkan Indikator dari Sasaran 6.**



Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel 15 berikut ;

**Tabel 15. Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah**

No.	Indikator	Awal RPJMD 2020	Target		Capaian		Target 2023	Capaian s/d 2022 terhadap target s.d 2022 (%)
			2021	2022	2021	2022		
1.	Skor Pola Pangan Harapan	92,3	90,6	92,5	87,3	93,4	93,2	100,97
2.	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mut dan Keamanan Pangan	64,21%	66,71%	69,21%	90,91%	88,24%	71,71%	127,50
3.	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan	9,5%	9,0%	7,5%	9,0%	12,14%	6,5%	61,78
4.	Desa Mandiri Pangan	21 Desa	22	31	22	31	41	100
5.	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	13,75%	19,61%	19,61%	37,13%	70,07%	19,61%	357,32
6.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	9,5%	9,0%	7,5%	9,0%	4,90%	6,5%	153,06
7.	Stabilitas Harga Pangan a. Pangan Pokok (Beras)	CV<10%	10%	10%	2,5%	2,8%	10%	357,14
	b. Pangan Strategis (Hortikultura)	CV<58%	30%	30%	10,09%	12,6%	30%	238,10

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah melebihi dari target yang telah ditetapkan diatas 100 %, dengan kriteria sangat baik.

2. **Capaian Kinerja Keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintah sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.**

Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan didukung oleh 15 (lima belas) Kegiatan, adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai dapat kami sampaikan secara ringkas sebagai berikut :

**2.1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya
- Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Infrastruktur Logistik
- Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Kemandirian Pangan

**2.2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- Koordinasi, Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan dan Kelembagaan Jaringan Distribusi Pangan
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

**2.3. Kegiatan Penyediaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi.**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

**2.4. Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

**2.5. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi per Kapita per Tahun

**2.6. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

**2.7. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari satu (1) daerah Kabupaten/Kota dalam satu (1) Daerah Provinsi

**2.8. Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi



- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

## **2.9. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

### **Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

## **2.10. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

### **Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

## **2.11. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

### **Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

## **2.12. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

### **Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### **2.13. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Pengadaan Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### **2.14. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **2.15. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi;**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk Uraian Program dan Kegiatan diatas dapat dilihat Pagu Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2022 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada tabel berikut:

**REALISASI APBD TA. 2022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN		
				REALISASI KEUANGAN		FISIK
		Rp	Rp	Rp	%	Rp
1	2	4		5	6	7
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI						
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		565.776.150	565.776.150	544.814.587	96,30	100,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	163.197.000	159.414.000	159.414.000	100,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	77.242.750	43.817.750	37.767.750	86,19	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	82.200.000	84.450.000	84.450.000	100,00	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.401.000	106.153.000	91.241.437	85,95	100,00
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.735.400	171.941.400	171.941.400	100,00	100,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.481.928.751	9.897.296.577	9.315.265.115	94,12	100,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.120.623.251	9.542.896.077	8.962.377.115	93,92	100,00
2	Peyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32.438.000	32.438.000	32.438.000	100,00	100,00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	206.230.000	220.860.000	220.660.000	99,91	100,00
4	Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi	15.650.000	15.650.000	15.487.500	98,96	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	24.130.000	22.655.000	22.640.000	99,93	100,00
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.232.500	5.662.500	5.662.500	100,00	100,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	24.130.000	22.950.000	22.905.000	99,80	100,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	39.495.000	34.185.000	33.095.000	96,81	100,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		9.450.000	18.450.000	18.450.000	100,00	100,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.450.000	18.450.000	18.450.000	100,00	100,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		476.522.154	1.607.014.258	1.601.950.469	99,68	100,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.343.360	5.227.200	5.215.000	99,77	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.401.304	16.770.000	15.905.400	94,84	100,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.160.000	58.125.000	57.509.600	98,94	100,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.751.530	65.652.780	65.651.830	100,00	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.963.960	21.963.960	21.960.000	99,98	100,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	261.902.000	1.439.275.318	1.435.708.639	99,75	100,00
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15.414.100	-	-		-
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnva	15.414.100	-	-		-

**REALISASI APBD TA. 2022 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI**

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp	Rp	REALISASI KEUANGAN	FISIK
1	2	4	5	6	7
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI</b>					
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>274.579.496</b>	<b>261.078.476</b>	<b>257.126.866</b>	<b>98,49 100,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.726.320	39.100.000	39.100.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.950.000	103.966.500	102.730.206	98,81 100,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.655.576	50.655.576	50.400.000	99,50 100,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.247.600	67.356.400	64.896.660	96,35 100,00
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>370.196.924</b>	<b>339.931.924</b>	<b>334.601.926</b>	<b>98,43 100,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	271.700.000	252.060.000	246.747.762	97,89 100,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.630.000	42.630.000	42.628.664	100,00 100,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.659.924	18.484.924	18.470.000	99,92 100,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.207.000	26.757.000	26.755.500	99,99 100,00
<b>8.</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada</b>	<b>2.800.718.644</b>	<b>2.670.510.880</b>	<b>2.652.997.640</b>	<b>99,34 100,00</b>
1	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	622.671.000	482.595.000	482.045.000	99,89 100,00
2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2.126.047.880	2.126.047.880	2.109.084.640	99,20 100,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	26.686.764	18.868.000	18.868.000	100,00 100,00
4	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	25.313.000	43.000.000	43.000.000	100,00 100,00
<b>9.</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan</b>	<b>763.061.100</b>	<b>2.438.636.864</b>	<b>2.421.616.626</b>	<b>99,30 100,00</b>
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	28.749.000	74.324.764	74.324.764	100,00 100,00
2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	566.255.000	1.536.255.000	1.536.243.200	100,00 100,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	49.465.000	49.465.000	49.465.000	100,00 100,00
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	50.594.000	710.594.000	693.585.562	97,61 100,00
5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	67.998.100	67.998.100	67.998.100	100,00 100,00
<b>10.</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>200.010.061</b>	<b>1.578.326.079</b>	<b>1.578.176.068</b>	<b>99,99 100,00</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	50.000.100	182.566.772	182.566.772	100,00 100,00
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	49.999.000	44.555.000	44.405.000	99,66 100,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	50.000.100	50.000.100	50.000.100	100,00 100,00
4	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	50.010.861	1.301.204.207	1.301.204.196	100,00 100,00
<b>11.</b>	<b>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00 100,00</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00 100,00
<b>12.</b>	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan</b>	<b>168.008.237</b>	<b>168.008.237</b>	<b>166.502.900</b>	<b>99,10 100,00</b>
1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	68.000.237	68.000.237	66.494.900	97,79 100,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00 100,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	50.008.000	50.008.000	50.008.000	100,00 100,00
<b>13.</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>	<b>173.179.600</b>	<b>173.175.500</b>	<b>172.175.500</b>	<b>99,42 100,00</b>
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	173.179.600	173.175.500	172.175.500	99,42 100,00
<b>14.</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.849.776.000</b>	<b>1.849.776.000</b>	<b>1.846.731.000</b>	<b>99,84 100,00</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1.799.776.000	1.799.776.000	1.796.731.000	99,83 100,00
2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00 100,00
<b>15.</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah</b>	<b>560.306.788</b>	<b>560.302.948</b>	<b>536.910.442</b>	<b>95,83 100,00</b>
1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	49.999.400	49.999.400	49.956.500	99,91 100,00
2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah	60.631.598	60.631.598	52.834.112	87,14 100,00
3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.997.440	49.997.440	49.994.940	99,99 100,00
4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.906.520	49.906.520	46.366.500	92,91 100,00
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	349.771.830	349.767.990	337.758.390	96,57 100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.758.928.005</b>	<b>22.178.283.893</b>	<b>21.497.319.139</b>	<b>96,93 100,00</b>

### 3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	<b>Kebijakan :</b>		
1.	Mempercepat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal.	PP 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal.
2.	Mengembangkan Teknologi Pengolahan Pangan, terutama Pangan Lokal Non Beras dan Terigu guna Meningkatkan Nilai Tambah dan Nilai Sosial	PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Pengolahan Pangan Lokal menjadi Nilai Tambah dan Nilai Sosial
3.	Membangun Desa Mandiri Pangan (Daerah Berisiko Rentan Rawan Pangan)	Permenpan 43 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).	Menurunkan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, Meningkatkan Pendapatan Keluarga Petani, Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan dan Mengakhiri Kelaparan. Mempercepat Pembangunan di Perdesaan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal Masyarakat dan Rumah Tangga.
4.	Memperkuat Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dalam rangka Memperkuat Akses Pangan Masyarakat.	UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 49	Menjamin Ketersediaan dan Menjaga Stabilitas Harga dipasar
5.	Meningkatkan Peran serta Kelembagaan Masyarakat dalam Distribusi, Kestabilan Harga dan Akses Pangan	Kepgub Jambi No 123/Kep.Gub/Dishanpan-3.1/2020 tentang pembentukan tim satgas pangan, Kepgub Jambi No. 537/Kep.Gub/Dishanpan-3.3/2020 tentang pembentukan tim pengelolaan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat Tahun 2020	Mengendalikan dan Menjaga Kestabilan Stok Pangan Masyarakat
6.	Mengembangkan Kemampuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat secara Sinergis dan Partisipatif.	UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Kepgub Jambi No. 435/Kep.Gub/Dishanpan-3.3/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Perda Provinsi Jambi tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan	Penyediaan Pangan pada Kerawanan Pangan Pasca Bencana Alam dan Keadaan Darurat, Perubahan Gejolak Harga, Rawan Pangan Transier Khusus Daerah Terisolir/Kondisi Darurat karena Bencana, Tersalur kannya dana Bansos pada poktani/ gapoktan, pembinaan, pemantauan pada poktan/gapoktan.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
7.	Mengembangkan Keamanan Pangan Segar di Daerah Sentra Pangan, Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	Permentan 53 Tahun 201 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Strategis Asal Tumbuhan. Pergub Jambi No 26 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD BPMKP pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Keputusan Gubernur Jambi No. 409/ Kep.Gub/Dishanpan-5.5/2019 tentang penunjukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Provinsi Jambi	Telah diusulkan Kegiatan Pembangunan Gedung dan Peralatan Laboratorium UPTD BPMKP ke Pemerintah Daerah dan Pusat, tetapi belum terlaksana sampai saat ini.
	<b>Strategi</b>		
1.	Mencegah dan Menanggulangi Kondisi Rawan Pangan secara Dinamis	Permenpan 43 Tahun 2010 tentang System Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk Mengantisipasi Secara Dini Resiko Terjadinya Kerawanan Pangan.	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan untuk mengetahui Kecamatan dan Desa yang Ditangani Secara Dini.  Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk Mengetahui bulan-bulan tertentu terjadinya Rentan Rawan Pangan disuatu Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.  Kegiatan Desa Mandiri Pangan, Kegiatan Pertanian Keluarga dan Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU) didaerah Rentan Rawan Pangan untuk Mengantisipasi terjadinya Penduduk Rawan Pangan.
2.	Meningkatkan Ketersediaan dan Keragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal : Diversifikasi Tanaman, Pemanfaatan Pekarangan, Peningkatan Intensitas Pertanaman, Optimalisasi Lahan	UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Terciptanya Beragam Pangan Lokal, Pekarangan yang ada ditanamin berbagai Pangan Lokal, Pelestarian Pemanfaatan Tanaman Pangan
3.	Koordinasi dan Pemantauan Arus Keluar Masuk Bahan Pangan untuk 3 Komoditi (Beras, Cabe, Bawang Merah (Inflasi) Kerjasama dengan Perhubungan, Jembatan Timbang, Pelabuhan, Pasar Induk).	UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 47, 40, 49	Pemantauan Arus Keluar Masuk Komoditi Pangan di Pasar Induk.
4.	Memperkuat System dan Lembaga Distribusi (Kelompok Tani, Gapoktan, TTI).	Permentan 15 tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pertanian (ROHAYATI).	Memfasilitasi Pemasaran Komoditi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang dihasilkan oleh Poktan/Gapoktan/Lembaga Masyarakat yang bergerak di Bidang Pertanian Fasilitas Akses Pasar melalui Toko Tani Indonesia (TTI)
5.	Memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah, Kelembagaan, Masyarakat secara Sinergi dan Partisipatif.	PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Penguatan Cadangan Pangan melalui Pembelian Produksi Dalam Negeri sesuai HPP untuk Menanggulangi Pasca Bencana Alam/Keadaan Darurat.

### 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut :

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat daerahnya. Mengingat Tupoksi Utama Dinas untuk Menjamin Kecukupan dan Ketersediaan Pangan, mengatasi Kerentanan Pangan serta mengambil Langkah-langkah Strategis menghadapi Gejolak Harga Pangan Pokok secara merata diseluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi	Terkait rekomendasi tersebut, kami akan berupaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam menjamin kecukupan dan ketersediaan pangan, mengatasi kerentanan pangan serta mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi gejolak harga pangan pokok secara merata di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.	Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan akan mengupayakan :  1. Bekerjasama dengan Dinas Lingkup Pertanian dan Perikanan dalam rangka menjamin kecukupan dan ketersediaan pangan, dikarenakan Dinas teknis tersebut berkontribusi terhadap ketersediaan pangan. 2. Menggali potensi-potensi daerah kabupaten/kota terkait potensi pangan apa yang bisa dikembangkan di daerah kabupaten/kota tersebut. 3. Berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022, secara komposit terlihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan (Prioritas 1 - 3) yang mana pada tahun 2021 terdapat 10 Kecamatan yang masuk kategori prioritas 1-3 menjadi 7 Kecamatan di tahun 2022. Dari 7 kecamatan yang masuk prioritas 1 - 3 tersebut, kedepan akan dilihat lagi desa-desa mana yang masih merah dan pada indikator apa saja yang masih merah tersebut. Diupayakan akan dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok taninya melalui pemberian bantuan pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompoknya. Pembinaan ini tentunya perlu didukung oleh kabupaten/kota, mengingat lokasi kegiatan dan kewenangannya berada pada kabupaten/kota.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			<p>4. Langkah-langkah strategis dalam menghadapi gejolak harga pangan pokok maupun pangan strategis diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan harga pangan pokok / pangan strategis di setiap kabupaten/kota melalui petugas dari Dinas / Instansi yang Menangani Ketahanan Pangan.</li> <li>Melakukan pengawasan harga dan stok pangan melalui Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, maka Tim Satgas Pangan akan melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke 11 kabupaten/kota terkait harga, ketersediaan dan kecukupan pangan dilapangan.</li> <li>Mengupayakan adanya semacam peraturan / surat keputusan / surat edaran Gubernur Jambi terkait dengan harga pangan, diupayakan agar harga pangan berada pada kisaran harga normal, (tidak terlalu melonjak tinggi).</li> <li>Melakukan gerakan pangan murah/gelar pangan murah di 11 kabupaten/kota, dengan harapan masyarakat dapat membeli kebutuhan pangannya dengan harga terjangkau.</li> </ol> <p>5. Jika memungkinkan, ada semacam dana talangan yang disediakan Pemda Provinsi Jambi untuk kegiatan tunda jual (untuk sementara komoditas padi), dimana disaat petani panen raya, biasanya harga gabah rendah, kita minta mereka tidak langsung menjual hasil panennya ke pedagang pengumpul, melainkan ditunda selama beberapa hari menjelang harga normal kembali. Untuk kebutuhan petani dan keluarganya tersebut, kita gunakan dana talangan yang telah disiapkan yang dipinjamkan kepada petani, dan pada saat harga gabah sudah normal kembali, petani dapat membayarkan kembali dana pinjaman tadi.</p>



## **BAB IV.**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **5.3. Dekonsentrasi.**

##### **5.3.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4816);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 03);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;

##### **5.3.2. Dana dan Instansi Pemberi Dana Dekonsentrasi**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tidak mendapatkan Dana Dekonsentrasi untuk Tahun Anggaran 2022.

### **5.3.3. Satker Pelaksana.**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tidak memiliki Satker Pelaksana Dana Dekonsentrasi untuk TA. 2022.

### **5.3.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya.**

-

### **5.3.6. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi cukup berjalan dengan baik, namun tentunya masih terdapat Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan, antara lain:


1. Keterlambatan dalam memulai pelaksanaan kegiatan meskipun DPA sudah terbit.
2. Keterlambatan dalam penggunaan dana kegiatan Bantuan Sosial dikarenakan adanya kendala musim kemarau dan memasuki bulan puasa sehingga kelompok tani dilapangan belum dapat melaksanakan kegiatan dan belum menggunakan dana tersebut.
3. Permasalahan secara umum untuk kelompok lama penerima Bantuan Sosial ;
  - a. Ada kecendrungan bahwa kelompok tani kurang aktif pada saat dana Bantuan Sosial tidak ada lagi.
  - b. Pembukuan pada kelompok masih perlu diperbaiki, karena ada beberapa yang tidak melakukan pencatatan.
  - c. Kurangnya pemahaman pendamping/kelompok agar kegiatan berlanjut.
  - d. Pendamping sebagian besar kurang aktif dalam menjalankan tugasnya.
  - e. Pembinaan dari Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan.

### **Solusi :**

1. Untuk meningkatkan capaian keluaran sangat diharapkan agar target keluaran dari awal hingga akhir tahun anggaran tidak mengalami perubahan, sehingga akan lebih fokus dengan target tersebut, dan untuk perbaikan kedepannya sangat diharapkan agar percepatan pelaksanaan kegiatan sesuaikan dengan jadwal yang telah disusun sehingga capaian keluaran dapat tepat waktu.
2. Dalam rangka perbaikan kinerja serapan anggaran untuk tahun anggaran selanjutnya, sangat diharapkan agar serapan anggaran masing-masing kegiatan dapat mempedomani rencana penarikan dana yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Kedepan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan serapan anggaran sesuai dengan yang ditargetkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya; percepatan pelaksanaan kegiatan, sesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan, terkait kesiapan administrasi kegiatan agar dipersiapkan sedini mungkin sehingga tidak menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan.
4. Diupayakan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan pencairan anggaran dikelompok segera disiapkan seawal mungkin sehingga dana dapat digunakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
5. Kedepannya bagi kelompok lama penerima Bantuan Sosial:
  - Diupayakan harus berkelanjutan walaupun kedepannya tidak menerima bantuan lagi, dan harus melakukan administrasi pembukuan dan pencatatan yang baik.
  - Pendamping Kelompok dan Pendamping Kabupaten/Kota harus aktif dalam menjalankan tugasnya, diupayakan diberikan pemahaman dan mendapatkan pengetahuan guna peningkatan kemampuan sumberdaya manusianya agar kegiatan dikelompok dapat berjalan dan berkelanjutan, serta Pembinaan dari Kabupaten/Kota harus ditingkatkan.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan sebagai bahan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2022 dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, terima kasih.

Jambi, Januari 2023  
KEPALA DINAS,



ASRAF, S.Pt, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661120 199403 1 006

# LAMPIRAN

3.4.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi											
	09.01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, dan Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Tahun Berkenaan	%	100	96,93	12.689.547.385	12.072.208.963		
	09.01.1.01					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dok Kinerja OPD, Dok Perencanaan, Dok Evaluasi, Dok Renstra dan Renja, Koord dan Sinkronisasi Perencanaan, tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen	5	5	565.776.150	544.814.587		
	09.01.1.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	159.414.000	159.414.000		
	09.01.1.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	11	11	43.817.750	37.767.750		
	09.01.1.01	04					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	2	2	84.450.000	84.450.000		
	09.01.1.01	06					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	106.153.000	91.241.437		
	09.01.1.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	171.941.400	171.941.400		
	09.01.1.02					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	Laporan	2	2	9.897.296.577	9.315.265.115		
	09.01.1.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	66	61	9.542.896.077	8.962.377.115		
	09.01.1.02	02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	32.438.000	32.438.000		
	09.01.1.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	220.860.000	220.660.000		
	09.01.1.02	04					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	15.650.000	15.487.500		

No.		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
09.01.1.02	05						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	22.655.000	22.640.000		
09.01.1.02	06						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2	5.662.500	5.662.500		
09.01.1.02	07						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan	18	18	22.950.000	22.905.000		
09.01.1.02	08						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	2	2	34.185.000	33.095.000		
09.01.1.05						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya SDM Aparatur yang berkualitas	%	82	100	18.450.000	18.450.000		
09.01.1.05	09						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20	18.450.000	18.450.000		
09.01.1.06						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	80,9	1.607.014.258	1.601.950.469		
09.01.1.06	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	5.227.200	5.215.000		
09.01.1.06	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	16.770.000	15.905.400		
09.01.1.06	04						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	58.125.000	57.509.600		
09.01.1.06	05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	65.652.780	65.651.830		
09.01.1.06	06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	21.963.960	21.960.000		
09.01.1.06	09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1.439.275.318	1.435.708.639		
09.01.1.07						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	0	0	0		
09.01.1.07	11						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	0	0	0		
09.01.1.08						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Peningkatan Pelayanan Penunjang Perkantoran	%	100	98,49	261.078.476	257.126.866		
09.01.1.08	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	39.100.000	39.100.000		

No.		Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
09.01.1.08	02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	103.966.500	102.730.206		
09.01.1.08	03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	50.655.576	50.400.000		
09.01.1.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	67.356.400	64.896.660		
09.01.1.09						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	98,43	339.931.924	334.601.926		
09.01.1.09	01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	20	20	252.060.000	246.747.762		
09.01.1.09	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	42.630.000	42.628.664		
09.01.1.09	10						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	18.484.924	18.470.000		
09.01.1.09	11						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	2	26.757.000	26.755.500		
09.02					Program Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			Jumlah Desa Mandiri Pangan	Desa	31	31	2.670.510.880	2.652.997.640		
								Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	19,61	70,07				
09.02.1.01						Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan pada Berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi Jambi		Terwujudnya Kemandirian Pangan di Daerah Rentan Rawan Pangan	Unit	5	9	2.670.510.880	2.652.997.640		
09.02.1.01	01						Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia	Unit	0	0	0	0		
09.02.1.01	02						Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang tersedia	Unit	5	2	482.595.000	482.045.000		
09.02.1.01	03						Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	5	7	2.126.047.880	2.109.084.640		
09.02.1.01	04						Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	2	2	18.868.000	18.868.000		

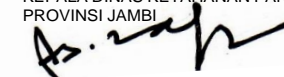


No.		Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
09.02.1.01	05						Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	2	2	43.000.000	43.000.000		
09.03					Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			Skor PPH Konsumsi	Skor	92,5	93,4	4.234.971.180	4.216.295.594		
								Konsumsi Beras	kg/kap/thn	88,2	88,1				
								Konsumsi Energi	kcal/kap/hr	2090,3	2070				
								Konsumsi Protein	gr/kap/hr	61	60,7				
								Skor PPH Ketersediaan	Skor	87,5	86,2				
								Ketersediaan Energi	kcal/kap/hr	3010	2819				
								Ketersediaan Protein	gr/kap/hr	81,5	70,25				
								Stabilitas Harga Pangan Pokok	CV<10%	CV<10%	CV<2,8%				
								Stabilitas Harga Pangan Strategis	CV<30%	CV<30%	CV<12,6%				
09.03.1.01						Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Harga Pangan		Lacarnya Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok	Kab/Kota	11	11	2.438.636.864	2.421.616.626		
09.03.1.01	01						Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	2	2	74.324.764	74.324.764		
09.03.1.01	02						Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	Laporan	1	1	1.536.255.000	1.536.243.200		
09.03.1.01	03						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	3	3	49.465.000	49.465.000		
09.03.1.01	04						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	3	3	710.594.000	693.585.562		
09.03.1.01	05						Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan	Unit	5	5	67.998.100	67.998.100		
09.03.1.01	06						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	1	0	0	0		
09.03.1.02						Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Tercapainya Jumlah Cadangan Pangan dan Kebutuhan Pangan Lokal	Kab/Kota	11	11	1.578.326.079	1.578.176.068		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	2	2	182.566.772	182.566.772		
							Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	1	44.555.000	44.405.000		
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	2	2	50.000.100	50.000.100		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
						Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	61	61	1.301.204.207	1.301.204.196		
					Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat		Menetapkan Harga Acuan Pemerintah Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Kab/Kota	11	11	50.000.000	50.000.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	2	2	50.000.000	50.000.000		
					Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi		Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kali	1	1	168.008.237	166.502.900		
						Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1	68.000.237	66.494.900		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	3	3	50.000.000	50.000.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	2	2	50.008.000	50.008.000		
					Program Penanganan Kerawanan Pangan		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	7,5	4,90	2.022.951.500	2.018.906.500		
							Persentase Penduduk Berisiko Rentan Rawan Pangan	%	7,5	12,14				
					Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi		Diketahuinya Indeks Ketahanan Pangan dan Daerah Rentan Rawan Pangan Kecamatan dan Desa se Provinsi Jambi	11 Kab/Kota (143 Kec) (1.562 Desa)	11	11	173.175.500	172.175.500		
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang dimutakhirkan	Dokumen	2	2	173.175.500	172.175.500		
					Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi		Terdeteksinya Secara Dini Daerah Rentan Rawan Pangan dan Menurunnya Daerah Berisiko Rentan Rawan Pangan	Kab/Kota (143 Kec) (1.562 Desa)	11	11	1.849.776.000	1.846.731.000		
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	2	2	1.799.776.000	1.796.731.000		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
						Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Dokumen	3	3	50.000.000	50.000.000		
				Program Pengawasan Keamanan Pangan			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	69,21	88,24	560.302.948	536.910.442		
					Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	%	69,21	88,24	560.302.948	536.910.442		
						Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Dokumen	1	1	49.999.400	49.956.500		
						Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sertifikat	22	22	60.631.598	52.834.112		
						Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	1	49.997.440	49.994.940		
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	1	49.906.520	46.366.500		
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	1	349.767.990	337.758.390		
											22.178.283.893	21.497.319.139		

Jambi, Januari 2023  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAMBI



ASRAF, S.Pt, M.Si  
Pembina Utama Muda/ IV.C  
NIP. 19661120 199403 1 006

## Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2021 Provinsi Jambi yang ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2022

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAKLANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH/BIRO
	Untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat daerahnya. Mengingat tupoksi utama Dinas untuk menjamin kecukupan dan ketersediaan pangan, mengatasi kerentanan pangan serta mengambil langkah-langkah strategis menghadapi gejolak harga pangan pokok secara merata di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.	Terkait rekomendasi tersebut, kami akan berupaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam menjamin kecukupan dan ketersediaan pangan, mengatasi kerentanan pangan serta mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi gejolak harga pangan pokok secara merata di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.	<p>Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan akan mengupayakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1). Bekerjasama dengan Dinas Lingkup Pertanian dan Perikanan dalam rangka menjamin kecukupan dan ketersediaan pangan, dikarenakan Dinas teknis tersebut berkontribusi terhadap ketersediaan pangan.</li> <li>(2). Menggali potensi-potensi daerah kabupaten/kota terkait potensi pangan apa yang bisa dikembangkan di daerah kabupaten/kota tersebut.</li> <li>(3). Berdasarkan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022, secara komposit terlihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan (Prioritas 1 – 3) yang mana pada tahun 2021 terdapat 10 Kecamatan yang masuk kategori prioritas 1-3 menjadi 7 Kecamatan di tahun 2022. Dari 7 kecamatan yang masuk prioritas 1 – 3 tersebut, kedepan akan dilihat lagi desa-desa mana yang masih merah dan pada indikator apa saja yang masih merah tersebut. Diupayakan akan dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok taninya melalui pemberian bantuan pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompoknya. Pembinaan ini tentunya perlu didukung oleh kabupaten/kota, mengingat lokasi kegiatan dan kewenangannya berada pada kabupaten/kota.</li> <li>(4). Langkah-langkah strategis dalam menghadapi gejolak harga pangan pokok maupun pangan strategis diantaranya : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemantauan harga pangan pokok / pangan strategis di setiap kabupaten/kota melalui petugas dari Dinas / Instansi yang Menangani Ketahanan Pangan.</li> <li>b. Melakukan pengawasan harga dan stok pangan melalui Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi. Untuku menjaga stabilitas harga pangan, maka Tim Satgas Pangan akan melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) ke 11 kabupaten/kota terkait harga, ketersediaan dan kecukupan pangan dilapangan.</li> <li>c. Mengupayakan adanya semacam peraturan / surat keputusan / surat edaran Gubernur Jambi terkait dengan harga pangan, diupayakan agar harga pangan berada pada kisaran harga normal, (tidak terlalu melonjak tinggi).</li> <li>d. Melakukan gerakan pangan murah/gelar pangan murah di 11 kabupaten/kota, dengan harapan masyarakat dapat membeli kebutuhan pangannya dengan harga terjangkau.</li> </ol> </li> </ol>	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

**Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2021 Provinsi Jambi yang ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2022**

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2022	TINDAKLANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	PERANGKAT DAERAH/BIRO
			(.5). Jika memungkinkan, ada semacam dana talangan yang disediakan Pemda Provinsi Jambi untuk kegiatan tunda jual (untuk sementara komoditas padi), dimana disaat petani panen raya, biasanya harga gabah rendah, kita minta mereka tidak langsung menjual hasil panennya ke pedagang pengumpul, melainkan ditunda selama beberapa hari menjelang harga normal kembali. Untuk kebutuhan petani dan keluarganya tersebut, kita gunakan dana talangan yang telah disiapkan yang dipinjamkan kepada petani, dan pada saat harga gabah sudah normal kembali, petani dapat membayarkan kembali dana pinjaman tadi.	

Jambi, Januari 2023  
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
 PROVINSI JAMBI



ASRAF, S.Pt, M.Si  
 Pembina Utama Muda/ IV.C  
 NIP. 19661120 199403 1 006